



Mewujudkan Politik Simpatik dengan Meningkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto)

Hyronimus Ario Dominggus*, Pius Pandor*

¹Program Studi Magister Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, 65146

²Dosen Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, 65416

Submitted : 19 Januari 2022 Revision : 15 Mei 2022 Accepted : 15 Juni 2022

Abstrak

Penelitian studi ini memiliki tujuan menelaah pendidikan karakter sebagai fondasi atau titik tolak terwujudnya politik simpatik. Politik simpatik dalam hal ini merujuk pada bagaimana kekuasaan itu diolah dengan baik. Dewasa ini politik seperti itu sedang mengalami degradasi. Fenomena banyaknya kasus korupsi, sikap apatis dan intoleransi di lingkungan para pejabat atau pemimpinan negara mencerminkan situasi melemahnya "roh" politik simpatik tersebut. Tentu saja ada begitu banyak asumsi yang menggarisbawahi alasan dibalik fenomena itu muncul. Menurut penulis peningkatan pendidikan karakter mendesak untuk diimplementasikan. Pendidikan karakter sedapat mungkin dikenal dan dialami setiap masyarakat, terutama generasi muda. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni studi pustaka dengan pendekatan fenomenologis dan ditinjau dari perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto. Dari riset ini, penulis menemukan titik dasar apa yang menjadi penopang keberhasilan sebuah politik simpatik yakni melalui pendidikan karakter. Melalui mutu Pendidikan karakter yang baik dan efisien, anak bangsa akan mampu mengaktualkan semangat politik simpatik ini.

Kata Kunci: Politik simpatik, Pendidikan karakter, sekolah, masyarakat

Abstract

This study aims to examine character education as the foundation or starting point for the realization of sympathetic politics. Sympathetic politics in this case refers to how power is managed properly. Today such politics is undergoing degradation. The phenomenon of many cases of corruption, apathy, and intolerance in the circles of state officials or leaders reflects the weakening situation of the sympathetic political "spirit". Of course, there are so many assumptions that underline the reasons behind the phenomenon. According to the writer, character education improvement is urgent to be implemented. As much as possible, character education has to be known and explored by every society, especially the younger generation. This research was conducted using a qualitative research method, namely a literature study with a phenomenological approach and viewed from the perspective of Armada Riyanto's Political Philosophy. From this research, the writer found the basic point of what supports the success of sympathetic politics, namely through character education. Through the quality of good and efficient character education, the nation's citizens will be able to actualize this sympathetic political spirit.

Keyword: Sympathetic politics, character education, school, community

How to Cite: Dominggus, H. A & Pius Pandor (2022). Mewujudkan Politik Simpatik dengan Meningkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto). *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2): 98-109.

*Corresponding author:

E-mail: hyronidomingussmm@gmail.com

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia tidak pernah terluput dari berbagai macam krisis moral. Tidak jarang media masa mengabarkan peristiwa-peristiwa seputar pembunuhan, pemerkosaan, penggunaan narkoba, intoleransi dan korupsi. Kasus korupsi misalnya menjadi kasus yang sering disoroti. Di barisan eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) sekitar Rp 8,2 miliar (Aditya 2020). Pada tanggal 25 September 2021, kali ini datang dari barisan legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah (Kamil, 2021).

Potret korupsi, intimidasi, dan krisis moral lainnya menunjukkan lemahnya sikap simpatik. Sikap individualistis atau "egoku" dalam hal ini mendominasi sehingga "yang lain" dianggap tidak ada. Orang yang korupsi sangat jelas tidak menaruh simpatik pada kepentingan sesamanya. Tindakan seperti ini mereduksi makna manusia yang dalam kodratnya memiliki cetusan sosialitas, relasi dirinya sebagai pribadi (aku) dengan manusia yang lain. Padahal cetusan dari kodratnya ini adalah apa yang menjadi persoalan orang lain menjadi persoalan kita bersama, kecemasan orang lain adalah kecemasanku juga (Armada Riyanto, 2014). Refleksi kritis selanjutnya

adalah bahwa sikap-sikap tak bermoral itu mengaburkan makna kehadiran orang lain sebagai representasi dari keberadaanku yang tidak sendirian.

Peristiwa-peristiwa yang terbilang krusial ini tentu saja muncul dengan berbagai macam motif. Dalam kasus korupsi misalnya, melerupnya nilai-nilai sosial memungkinkan kepentingan individu menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan umum (Pope, 2008). Selain itu kepemilikan harta benda pribadi menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku sosial sebagian besar orang. Hal ini menunjukkan bahwa motif mementingkan diri sendiri begitu kuat sehingga tidak ada ruang bagi kepentingan bersama. Lebih dramatis lagi ketika korupsi ini merajalela di tengah dunia dan khususnya Indonesia saat ini memerangi covid-19. Demikian juga munculnya kasus intoleransi menandakan kepentingan "kelompok" sendiri menjadi prioritas utama. Rasa simpatik memudar ditelan egoisme pribadi dan kelompok. Di sini sangat jelas ruang zona isolatif diciptakan bagi mereka yang berbeda paham, keyakinan bahkan yang tidak diperhitungkan (Armada Riyanto, 2018).

Krisis moral ini sangat mengganggu tatanan hidup bersama. Tidak hanya membumi di kalangan masyarakat tetapi juga menjerat para penampuk kekuasaan. Sejatinnya dalam konteks hidup bersama, rasa simpati sangat perlu dimiliki. Seorang pemimpin sudah pada tempatnya mengabdikan diri untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi. Demikian juga dalam membangun toleransi, rasa simpati menjadi

dorongan yang kuat untuk bisa menjalin relasi yang harmonis. Di sinilah wajah politik simpatik muncul. Politik simpatik dalam arti ini adalah politik yang mengedepankan kemanusiaan (Armada Riyanto, 2011).

Bagaimana mengatasi krisis moral yang masih begitu kuat membumi di Indonesia? Apa strategi yang memungkinkan manusia Indonesia dan khususnya para pemimpin memiliki jiwa politik simpatik? Dalam kaca mata penulis, salah satu usaha yang dapat meningkatkan jiwa politik simpatik adalah melalui peningkatan mutu pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter? Dalam membangun suatu masyarakat yang berkarakter baik dan kuat, sangat perlu memiliki pendidikan karakter (Pasandaran, 2017). Artinya bahwa mewujudkan suatu masyarakat bangsa dan negara yang kuat, tidak hanya cukup dengan menumbuhkan kemampuan berpikir tanpa memiliki jiwa karakter. Asumsi dasar inilah yang memungkinkan tesis bahwa politik simpatik akan berkembang bila didukung pendidikan karakter yang memadai dan efektif. Untuk itu, tujuan utama setiap lembaga pendidikan di Indonesia sejatinya adalah mampu secara holistik mengembangkan pribadi yang berkarakter terpuji, yang sudah siap secara personal dan sosial memasuki dunianya (Zuchdi, Prasetya, and Masruri, 2010). Memang sejauh ini pemerintah terus berusaha mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk menanamkan dan menumbuhkan revolusi mental melalui pendidikan karakter.

Penelitian berkaitan dengan pendidikan karakter ini sudah banyak digarap baik dalam bentuk buku maupun artikel. Munawar Noor menggarap penelitiannya dengan judul Pendidikan Karakter: Merawat Nurani Kebangsaan (Noor 2018). Noor menekankan bahwa pendidikan karakter menjadi medium dalam merawat nurani bangsa. Alasannya bahwa pendidikan karakter memiliki tujuan untuk menghormati kebudayaan dan persatuan yang ada di Indonesia saat ini. Irwansyah Suwahyu juga melakukan penelitian dengan judul Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Suwahyu 2019). Dengan bertolak dari gagasan Ki Hajar Dewantara, Suwahyu menyimpulkan bahwa Tripusat Pendidikan (peran keluarga, sekolah dan masyarakat) dijadikan sebagai acuan dasar sekaligus rambu-rambu pembentukan karakter dan mentalitas anak. Ketiga hal inilah menjadi tempat para individu dapat berkembang.

Penelitian-penelitian di atas secara umum telah menggambarkan bagaimana pendidikan karakter itu diimplementasikan dalam kehidupan. Pada penelitian ini, dengan bertolak dari pendekatan fenomenologis, penulis lebih menekankan bagaimana politik simpatik dalam tatanan hidup bersama mendapat ruang dan tempatnya. Politik simpatik dapat tercapai jika didukung dengan meningkatkan mutu pendidikan karakter baik secara formal maupun non-formal.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini pertama-tama akan menjabarkan Panorama politik simpatik dalam perspektif Armada Riyanto. Bagian ini menerangkan secara garis besar arti

dan makna politik simpatik. Pada bagian kedua akan diuraikan konsep pendidikan karakter dan bagaimana pengimplementasiannya di Indonesia. Dalam bagian ini juga, penulis menguraikan data-data yang menyinggung perkembangan pendidikan karakter di Indonesia. Di bagian ketiga, akan diuraikan keterkaitan antara peningkatan mutu pendidikan dengan politik simpatik. Tesis yang muncul adalah politik simpatik akan terwujud jika didukung dengan pendidikan karakter yang baik. Penelitian ini sangat aktual terutama dalam konteks tatanan hidup bersama masyarakat Indonesia. Rasa simpatik sejatinya selalu ditanam agar kelak anak-anak bangsa dapat mengaktulisasikannya dalam kehidupan bersama terutama sebagai seorang pemimpin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digarap dengan metode penelitian kualitatif (studi pustaka) dan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif dalam hal ini memiliki karakteristik deskriptif yakni menjabarkan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dimasukkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Albi Anggito and Setiawan 2018). Metode dengan pendekatan fenomenologi merujuk pada penelitian yang berbasis pengalaman keseharian hidup manusia (Armada Riyanto 2020). Studi fenomenologi dalam hal ini digunakan dalam menggali dan menjabarkan pengalaman kultural, religius spiritual, konflik sosial-politik, pergulatan minoritas dan seterusnya. Selain itu, penelitian ini juga ditinjau dari perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto. Yang akan

digarap dalam tulisan ini pertama-tama melihat peristiwa sebagai sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan bersama. Pada tempat kedua akan diuraikan secara filosofis makna dibalik peristiwa tersebut berdasarkan referensi atau sumber kualitatif (kepustakaan) berupa buku, catatan atau juga berdasarkan penelitian terdahulu. Tentu saja pada bagian ini, rujukan utama adalah tulisan Armada Riyanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panorama Politik Simpatik dalam Perspektif Armada Riyanto

Term politik simpatik ini penulis temukan dalam uraian Armada Riyanto dalam bukunya *Berfilsafat Politik*. Ia menjabarkan bahwa dalam rana tata hidup bersama, dikenal politik simpatik. Membaca politik simpatik pertama-tama tidak terlepas dari ruang politik itu sendiri. Politik dipahami sebagai perkara pengelolaan tata hidup bersama dan menjadikan *polis* (negara) layak huni, manusiawi, dan baik (Armada Riyanto 2011). Politik dalam artian ini bukan menggambarkan masalah eksploitasi publik, melainkan sebagai “medium” yang terbilang ampuh menuju masyarakat sejahtera. Hal tersebut bisa terjadi bilamana politik itu diintensikan untuk kepentingan publik (umum/masyarakat)(Sukmana dkk, 2015).

Oleh karena menyangkut tata hidup bersama, wajah politik juga dengan sendirinya menghadirkan rasa simpatik. Memang demikian dalam politik yang *in se* hadir untuk mengayomi dan sekaligus mensejahterakan masyarakat, dengan

sendirinya pula membentuk rasa simpatik. Sejalan dengan Riyanto, Fransiskus Sales Lega menerangkan bahwa politik pada dasarnya diupayakan untuk memajukan atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial (Lega 2016). Konsekuensinya jelas bahwa proses berpolitik mengarahkan pandangan pada prinsi politik *bonum commune* demi kepentingan bersama bukan pribadi. Dengan demikian tujuan politik tidak lain kalau tidak membuat manusia menjadi semakin mausiawi. Berproses dalam dunia politik berarti mengasah diri untuk menyelamatkan dan menghidupkan sesama manusia.

Politik simpatik dalam konteks ini tidak dikaitkan pertama-tama dengan penampilan simpatik para politikus dengan kata dan janji mereka, melainkan bagaimana sebuah kekuasaan yang mengatasi tata hidup personal dikemas, dikelola, diefektifkan (Armada Riyanto 2011). Dalam hal ini tidak dimaksudkan politik simpatik menyentuh sejauh mana kata-kata atau janji (terutama saat kampanye) dibungkus sedemikian rupa untuk menarik simpatik rakyat. Yang mau ditekankan dalam konteks ini jauh dari sekedar persoalan seberapa banyak kata yang manis dan indah diucapkan. Kekuasaan dikatakan simpatik, ketika etika kehidupan efektif, prinsip-prinsip kemanusiaan dibela, keadilan dilantukan dalam puisi dan lagu, dipraktekkan dalam ketegasan, dibela dalam cara-cara yang meyakinkan. Dan kekuasaan itu hadir tatkala manusia adalah preferensinya, bukan yang lain (Armada Riyanto, 2011). Asumsi ini dipertegas bahwa kekuasaan harus

dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya (Runi 2003).

Potret politik simpatik sejatinya muncul dalam tataran hidup bersama. Jelas orientasi atau tujuannya adalah untuk menghadirkan nilai-nilai yang mengangkat harkat dan martabat diri sebagai manusia. Dengan asumsi seperti ini, dapat dimengeri bahwa wajah kekuasaan dikatakan simpatik muncul ketika mengabdikan manusia, bila kekuasaan yang tidak represif, bila kekuasaan tidak menutup diri dari kritik-kritik konstruktif, bila kekuasaan tidak tirani, bila kekuasaan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan manusiawi (Armada Riyanto 2011). Gambaran intimidasi, intoleransi, bahkan korupsi tidak mendapat ruang dalam wajah kekuasaan simpatik ini. Politik simpatik tidak mengenal gambaran yang mengabaikan moralitas ini. Korupsi misalnya jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Lebih lagi para koruptor menjerat pejabat-pejabat yang berkecimpung dalam sektor publik - politisi, pegawai negeri yang memanfaatkan kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri (Pope 2008).

Mementingkan kesejahteraan bersama dan kepedulian terhadap orang lain menjadi karakteristik politik simpatik. Terkait hal ini Kymlicka menawarkan pentingnya memiliki keutamaan Civilitas yakni sikap respek terhadap sesame (Kymlicka 2001). Mengakui yang lain merupakan jalan untuk memecahkan otonomi yang egoistis dan tertutup. Hal ini berlaku bagi para penampung

kekuasaan. Tanpa berlandas asumsi dasar ini wajah politik akan selalu kabur, jauh dari harapan. Korupsi dan krisis moral lainnya tidak menjadikan suasana hidup bersama aman. Dengan kata lain dimensi altruisme (sikap peduli terhadap sesama) mendapat tempatnya. Itulah hakikat dunia politik.

Politik simpatik dalam hal ini juga menilik aneka pergumulan pengalaman kesaharian. Dalam konteks Indonesia misalnya, pergumulan tahun 1928 muncul gerakan bersama yang kemudian mencetuskan sumpah pemuda. Peristiwa tersebut menggambarkan pergumulan di mana tata nilai dan perjuangan melampaui sekat-sekat primordialisme agama, budaya, suku dan ras. Asumsi dasar ini hendak mengatakan bahwa bukan "egoku" yang mendominasi kehidupan bersama, tetapi rasa simpatik dengan menerima, menolong dan mencintai orang lain. Politik untuk kepentingan bersama (baca: negara dan bangsa) memang menjadi inti dari semua proses dan dinamika kehidupan politik.

Uraian di atas dengan demikian menjabarkan politik simpatik sebagai sebuah seni dan instrument kehidupan yang sejatinya makin memanusiawikan manusia dalam makna yang sedalam dan seluas-luasnya. Inilah gambaran ideal politik itu sendiri, bukan menafikkan realitas kesejahteraan sesama manusia.

Konsep Pendidikan Karakter

Setelah menjabarkan panorama politik simpatik dalam kaca mata Armada Riyanto, pada poin ini penulis akan menerangkan konsep pendidikan karakter dan

implementasinya dalam pendirian di Indonesia.

Pendidikan karakter secara umum dimengerti sebagai suatu usaha atau daya juang manusia dengan kesadaran dan terencana dalam mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik dalam rangka membentuk karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya (Siti Nur Aidah and KBM 2020). Mustoip (2018) menguraikan pendidikan karakter sebagai sebuah usaha sadar untuk menanamkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai kebaikan yang tearah pada tujuan memanusiakan manusia, untuk memperbaiki karakter dan melatih intelektual peserta didik, supaya tercipta generasi berilmu dan berkarakter yang dapat memberikan daya guna bagi lingkungan sekitar. Sementara itu, Lickona mengkonsepkan pendidikan karakter sebagai bentuk pendidikan yang mengasah kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, di mana hasilnya teraktualisasi dalam tindakan nyata, yakni tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghargai dan mengakui hak-hak orang lain, berkarakter kerja keras dan sebagiannya (Lickona 1991).

Merujuk pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu bentuk usaha dalam membangun dan memberdayakan manusia melalui pendidikan budi pekerti. Kata kunci yang muncul adalah memanusiakan manusia. Ini merupakan fokus pendidikan karakter. Dengan kata lain, pendidikan karakter menjadi medium untuk membentuk manusia yang berkarakter sehingga mampu

hidup dengan baik. Karena merupakan usaha manusia, maka Pendidikan karakter ini sangat penting dalam kehidupan bersama. Tidak menutup kemungkinan bahwa manusia-manusia yang memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, toleran dan sebagainya akan muncul. Manusia yang berkarakter pada akhirnya dapat menciptakan tata-tatan hidup bersama yang baik

Selain pengertian, pendidikan karakter juga memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu yang bersifat kontinuitas serta melatih kemampuan diri menuju ke arah hidup yang lebih baik (Juliardi 2016). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk individu atau pribadi menjadi pelaku perubahan bagi dirinya sendiri dan masyarakat yang melingkupinya dengan menunjukkan perilaku yang berasaskan keutamaan. Pendidikan karakter dengan demikian bersifat holistik ingin membentuk individu yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, berbudi baik, namun juga mesti dapat menjadi agen perubahan bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Pendidikan Karakter dalam Konteks Indonesia:

Salah satu indikator keberhasilan sebuah bangsa ditentukan juga oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM) yang memadai (Rachmah, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran manusia dalam memajukan kehidupan bangsa. Kualitas dalam hal ini tidak hanya mengurus perkara pembentukan

intelektual yang memadai, tetapi juga pendidikan karakter.

Fenomena krisis moral bisa terjadi karena lemahnya SDM terutama pendidikan karakternya. Untuk itu, dalam konteks ini pendidikan karakter masih sangat relevan dalam mengatasi krisis tersebut (Iriany 2014). Ini merupakan panorama masalah sosial yang terbilang krusial dan fase kritis yang belum dapat diatasi secara tuntas. Tidak luput para elite pemerintah juga terjerat di dalamnya.

Pendidikan karakter akan memberi landasan bagi seseorang untuk memberi pertimbangan moral mengenai apa yang baik dan benar. Pertimbangan moral itu tentu saja akan menjadi fondasi yang mendorong seseorang bersikap terhadap sesuatu, dan sekaligus memacu untuk bertindak atau tidak bertindak (Pasandaran 2017).

Dalam konteks Indonesia, Pendidikan karakter tidak terlepas dari konsep Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bersama. Merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila, dapat diafirmasi bahwa tujuan pendidikan karakter adalah membentuk dan membangun bangsa yang tangguh, berjiwa kompetitif, memiliki akhlak yang mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Gunawan 2012). Karena itu, tidak salah semua lapisan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan mutu pendidikan karakter ini. Mengingat tujuannya yang sangat baik ini,

pemerintah terus menerus mencari metode yang pas dan kontekstual agar pendidikan karakter sejalan dengan cita-cita luhur bangsa.

Hingga saat ini pemerintah terus menerus mengedepankan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam hal ini berusaha mencari cara agar pendidikan karakter tetap terfokus dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila sekali lagi dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengimplementasian pendidikan karakter ini. Kemendiknas menggarisbawahi tujuan pendidikan karakter di Indonesia yakni menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila yang meliputi: *Pertama*, mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik. *Kedua*, membangun dan mewujudkan bangsa yang berkeadilan Pancasila. *Ketiga*, mengembangkan sekaligus mengaktualisasikan potensi masyarakat negara supaya memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negara sendiri serta mencintai umat manusia (Kemendiknas 2011).

Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, pendidikan karakter juga sangat diperhatikan. Hal ini sangat nampak dengan ditetapkan dan diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Yasonna H. Laoly, 2017). Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi dari peraturan tersebut. *Pertama*, penguatan pendidikan karakter sangat perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan sekaligus

menghidupkan karakteristik bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai. Nilai-nilai ini bisa terfokus pada nilai religius, kejujuran, semangat toleransi, kedisiplinan yang kuat, bekerja keras pantang menyerah, kreatif, mandiri, memiliki jiwa demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. *Kedua*, penguatan pendidikan karakter ini merupakan tanggung jawab bersama dalam lingkungan keluarga, sekolah sebagai satuan pendidikan, dan juga masyarakat.

Pendidikan karakter dewasa ini diklaim sebagai salah satu cara penting dan ampuh dalam mengatasi krisis moral dalam kehidupan bersama. Pemerintah pun terus berusaha memetakan pendidikan karakter sebaik mungkin. Salah satu usaha penerapannya adalah melalui sistem pendidikan. Dunia pendidikan dalam hal ini masih menjadi medium untuk mengusahakan pendidikan karakter tersebut (Dianti 2014). Sangat diharapkan bahwa sistem pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi, pendidikan karakter tetap berjalan bersama. Modelnya tidak hanya terfokus pada tataran teoritis tetapi lebih banyak pada tindakan-tindakan praktis.

Mewujudkan Politik Simpatik dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan Karakter

Penulis mengafirmasi bahwa dengan bertolak dari fenomena krisis moral yang terus mendera, pendidikan karakter menjadi "medium" yang diterapkan dalam

kehidupan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan karakter memberikan penekanan pada pengembangan karakter manusia menjadi manusia yang lebih baik. Dalam hal ini pendidikan karakter dimengerti sebagai gambaran aktivitas manusia yang di dalamnya memiliki suatu tindakan dengan tujuan mendidik (Doni Kusuma A 2007).

Pendidikan karakter ini tentu saja sangat membantu pembentukan karakter manusia Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Satu di antaranya adalah dimensi politik. Mengingat semua orang memiliki peluang berkecimpung dalam dunia politik atau menjadi pemimpin, jelas pendidikan karakter sangat diperlukan. Hal ini juga bertolak dari kenyataan bahwa potret wajah politik di Indonesia kerap dinodai subyek yang menggumalnya. Korupsi, sikap apatis dan diskriminatif merupakan panorama “pelecehan” dunia perpolitikan. Kasus seperti korupsi dan diskriminatif jelas hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Dampaknya sangat terasa di mana kesejahteraan rakyat hanya menjadi konsumsi publik yang tidak kunjung tiba.

Potret “kebrutalan” dalam dunia politik mengindikasikan lemahnya pendidikan karakter dalam diri subyek atau orang yang berpolitik tersebut. Kekuatan ego yang cenderung memuaskan dahaga masih sangat kuat terasa. Padahal dalam kehidupan bersama para subyek yang berpolitik terutama para penampuk kekuasaan sejatinya menjadi grada terdepan dalam mewujudkan kebaikan bersama. Hal ini dapat

terwujud jika semua komponen menjalin kerja sama dan bahu-membahu dalam usaha membangun kehidupan yang baik. Kesejahteraan dalam konteks ini tentu tidak saja dalam perkara memenuhi kebutuhan ekonomi setiap manusia, tetapi menyangkut seluruh kebutuhan hidup manusia (Namang, 2020).

Terkait hal ini Pandor menawarkan beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan karakter (Pandor 2014). *Pertama*, melalui pengajaran. Supaya individu mampu membentuk karakter, perlu diberi pengajaran. Hal ini memungkinkan ia memilih orientasi berkaitan dengan nilai-nilai mana saja yang harus dihidupkan, dan sekaligus mengeliminir apa saja yang ditolak pemenuhannya. *Kedua*, keteladanan. Seorang individu akan menjadi pribadi yang berkarakter juga dapat didukung dengan keteladanan yang berkarakter baik terutama dari mereka yang dianggap lebih dewasa dan berpengalaman. *Ketiga*, menentukan prioritas. Dalam hal ini prioritas terhadap nilai pendidikan karakter harus diformulasikan dengan jelas dan dikenal oleh semua orang yang berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai individu maupun sebagai lembaga. *Keempat*, praksis prioritas. Yang ditekankan di sini menyangkut bukti pelaksanaan prioritas nilai pendidikan karakter tersebut. Sangatlah perlu diperhatikan evaluasi dan klarifikasi atas prioritas yang telah ditentukan. Tujuannya supaya pelaksanaan pendidikan karakter dapat dengan sungguh membawa dampak terhadap perkembangan karakter seseorang. *Kelima*, refleksi. Refleksi menjadi sarana untuk menarik makna dari apa yang menjadi

prioritas. Dalam hal ini karakter yang ingin ditumbuh-kembangkan oleh lembaga atau institusi perlu mendapatkan “ruang” untuk merefleksikan secara kritis dan sekaligus berkesinambungan.

Pentingnya pendidikan karakter dalam kaca mata penulis sangat membantu menumbuhkan jiwa politik simpatik. Dalam uraian sebelumnya dikatakan bahwa politik simpatik mengandaikan adanya semangat mementingkan kehidupan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan diprioritaskan, maka tidak heran jika pendidikan karakter diakui sebagai salah satu sarana membentuk karakter tersebut sejak dini. Penanaman nilai-nilai seperti nilai religious, kejujuran, toleransi, kepedulian, semangat kebangsaan, kekuatan cinta tanah air, dan bertanggung jawab harus menjiwai model atau sistem pendidikan di Indonesia. Semuanya ditanam sejak usia dini dan bersifat kontinuitas. Intinya sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan karakter seperti ini bertujuan untuk membentuk individu sebagai pelaku perubahan baik bagi dirinya maupun sesamanya. Dengan demikian pribadi yang matang dan integral secara penuh atau holistic biasanya terwujud dalam perilaku tekun, rajin, jujur, berani, mampu bertanggung jawab, memiliki daya juang, kesetiaan, kerendahan hati yang mendalam, ataupun mampu bekerja sama (Pandor 2020).

Semangat bersimpatik, belarasa, peduli, toleransi masih perlu ditingkatkan dalam proses pendidikan di Indonesia ini. Aktivitas pendidikan yang cenderung formal dan kaku perlahan-lahan diubah pada hal-hal praktis sekaligus mendasar

dalam kehidupan real peserta didik. Dengan adanya program pemerintah *Full day school* yang terbentuk dalam sistem KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang dimulai sejak 2017, harapan besarnya pendidikan karakter di Indonesia pun semakin bermutu dan memiliki daya serap yang tinggi bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Politik yang berkarakter simpatik menjadi bagian hakiki dalam tatanan hidup bersama. Politik seperti ini merujuk pada bagaimana tata kelola kekuasaan itu dijalankan. Kekuasaan berciri simpatik muncul ketika etika kehidupan efektif, prinsip-prinsip kemanusiaan dibela, keadilan disyairkan dalam nada-nada lagu dan puisi, dipraktekkan dalam ketegasan, dibela dalam cara-cara yang meyakinkan. Inilah wajah politik simpatik yang hadir untuk mensejahterakan manusia dalam kehidupan bersama.

Halnya berbeda ketika potret korupsi, diskriminasi, intoleransi membumi dan mengakar dalam kehidupan Bersama. Para elite politik atau penampuk kekuasaan kerap kali menjadi aktor tindakan seperti itu. Jelas sekali fenomena tersebut tidak mencirikan wajah politik simpatik. Semua itu menggambarkan sikap egois atau mementingkan diri sendiri.

Berhadapan dengan kenyataan ini, peningkatan mutu pendidikan karakter menjadi salah satu fondasi dasar mengatasi krisis seperti ini. Penulis mengafirmasi bahwa pendidikan karakter yang baik akan mewujudkan politik simpatik dalam tatanan hidup Bersama. Semua lapisan masyarakat bersama pemerintah dengan demikian perlu

bahu-membahu mempromosikan pendidikan karakter ini terutama dalam sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nicholas Ryan. 2020. "Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 17 Miliar Untuk Keperluan Pribadi." *Kom.* 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/06084861/mensos-juliari-diduga-terima-suap-rp-17-miliar-untuk-keperluan-pribadi>.
- Albi Anggito, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Armada Riyanto. 2011. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- — —. 2014. *Katalositas Dialogal*. Yogyakarta: Kanisius.
- — —. 2018. *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- — —. 2020. *Metodologi, Pemantik Dan Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Dianti, Puspa. 2014. "Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23 (1): 58-68. <https://doi.org/10.30997/jsh.v9i1.482>.
- Doni Kusuma A. 2007. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Iriany, Ieke Sartika. 2014. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 8 (1): 54-85. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/71>.
- Juliardi, Budi. 2016. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2 No. 2 (1). <https://doi.org/10.22219/jch.v1i1.10457>.
- Kamil, Irfan. 2021. "Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar." 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/06475071/jadi-tersangka-suap-wakil-ketua-dpr-azis-syamsuddin-punya-harta-rp-100>.
- Kemendiknas. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum Perbukuan.
- Kymlicka, Will. 2001. *Politics In The Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*. New York: Oxford University Press.
- Lega, Fransiskus Sales. 2016. "Filsafat Politik Kant Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan MISSIO* 8 (1): 20-40. <https://www.ejournal.stkipsantupaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/36/38>.
- Lickona, Tomas. 1991. *Educating for Character*. New York: Bantam Book.
- Namang, Raimundus Bulet. 2020. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2): 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Noor, Munawar. 2018. "Pendidikan Karakter: Merawat Nurani Kebangsaan." *Mimbar Administrasi* 14 (1): 18-31. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/904>.
- Pandor, Pius. 2014. *Seni Merawat Jiwa*. Jakarta: Obor.
- — —. 2020. "Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Atas Fenomena MCdonalisasi Pendidikan Dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Psiko-Edukasi* 18 (1): 1-17.
- Pasandaran, Sjamsi. 2017. "Politik Pendidikan Karakter: Refleksi

- Praxis Pendidikan Karakter Di Indonesia." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 2017. <https://doi.org/10.36412/ce.v1i2.497>.
- Pope, Jeremy. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia (The Coalition Against Corruption).
- Rachmah, Huriah. 2013. "Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang." *E-Jurnal Widya Non-Eksakta* 1.
- Runi, Hariantati. 2003. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati." *Demokrasi* no 1: 57-68.
- Siti Nur Aidah, and Tim Penerbit KBM. 2020. *Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bantul: KBM Indonesia.
- Sukmana, Oman, Luthfi J. Kurniawan, Abdussalama, and Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intras Publishing.
- Suwahyu, Irwansyah. 2019. "Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 23 (2): 192-204. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290>.
- Yasonna H. Laoly. 2017. "Lembaran Negara Republik Indonesia." 2017. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/ps87-2017.pdf>.
- Zuchdi, Darmiyati, Zuhdan Kun Prasetya, and Muhsinatun Siasah Masruri. 2010. *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Dan Pengembangan Kultur Sekolah*. Yogyakarta: UNY Press.